



BADAN PUSAT STATISTIK



SENSUS
EKONOMI
2026

DUKUNGAN DTSEN

untuk Bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Program
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial



Disampaikan pada Rapat Koordinasi Nasional Kementerian Sosial RI

Jakarta, 8 Juli 2025



Amalia Adininggar Widyasanti

Kepala Badan Pusat Statistik RI



DTSEN: HASIL KOLABORASI MEWUJUDKAN INSTRUKSI PRESIDEN

Tak Mau Kececer, Presiden Prabowo Instruksikan BPS Menyatupadukan Data Sosial dan Ekonomi

Kautsar Widya Prabowo • 26 November 2024 15:37

SHARE NOW

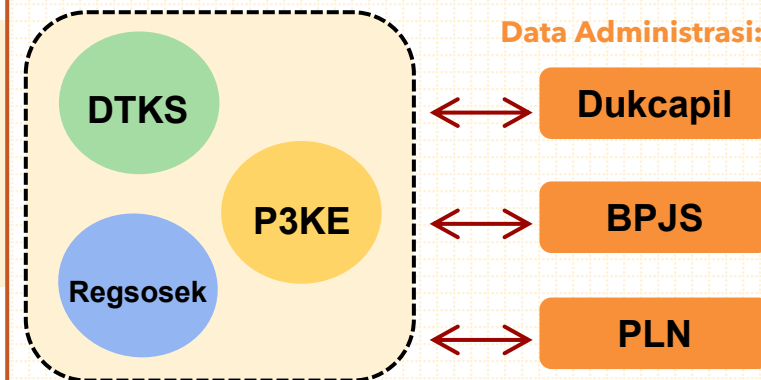
by Kautsar Widya
Prabowo



Jakarta: Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan **Badan Pusat Statistik (BPS)** untuk melahirkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi.

Prabowo enggan data sosial dan ekonomi tercecer di sejumlah kementerian dan lembaga.

Kondisi Data Sosial dan Ekonomi



Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN)

Per **3 Februari 2025***



285.579.122 penduduk



93.025.360 keluarga

*) juga sudah hasil rekonsiliasi dengan data Kemendagri

Penunggalan
Individu

Penunggalan
Keluarga

Penguatan
Variabel

Pemeringkatan
Kesejahteraan



INPRES NOMOR 4/2025 TENTANG DTSEN



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

DATA TUNGGAL SOSIAL DAN EKONOMI NASIONAL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka mendukung keterpaduan program pembangunan nasional dan sinergi antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang memerlukan pengelolaan data tunggal sosial dan ekonomi nasional yang akurat dan terintegrasi guna mencapai tujuan pembangunan yang terukur dan berkelanjutan sebagai dasar kebijakan, perencanaan, dan evaluasi pembangunan yang efektif, dengan ini menginstruksikan:

Kepada :

1. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Sosial;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
6. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal;
7. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Menteri Keuangan;
9. Menteri Komunikasi dan Digital;
10. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
11. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
13. Menteri Agama;
14. Kepala Badan Pusat Statistik;
15. Kepala Badan Siber dan Sandi Negara;
16. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
17. Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan; dan
18. Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Untuk KESATU :

Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan optimalisasi pelaksanaan integrasi data sosial dan ekonomi nasional dengan memastikan akurasi, interoperabilitas, dan pemutakhiran data, serta sinergi antar kementerian/lembaga.

KEDUA ...

SK No 235847 A

Peran dan Tugas Kepala BPS:

1

Menetapkan sumber dan jenis data serta pedoman integrasi data yang digunakan dalam penyusunan dan pengelolaan integrasi DTSEN

2

Menerima DTSEN yang mencakup informasi BNBA dari K/L, serta melakukan integrasi data secara nasional untuk menghasilkan DTSEN sebagai rujukan utama bagi K/L dan Pemda

3

Menyusun DTSEN yang akurat, terkini, dan terintegrasi

4

Mengelola DTSEN untuk penyelenggaraan kegiatan statistik, termasuk pemutakhiran dan pengamanan data sesuai standar terbaik

5

Menyerahkan pemanfaatan DTSEN kepada MenkoPM, Bappenas, Mensos sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

6

Melaporkan pelaksanaan integrasi DTSEN kepada Presiden secara berkala atau sewaktu-waktu jika diperlukan

BPS MEMBANGUN DAN MENYERAHKAN DTSEN, SESUAI AMANAT INPRES



Sesuai amanat Inpres 4 tahun 2025, Kepala BPS telah menyerahkan hasil pembangunan DTSEN kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat, dan Menteri Sosial pada **Kamis, 20 Februari 2025**



DTSEN merupakan hasil sinergi, kolaborasi, dan kerja sama antar Kementerian dan Lembaga untuk Indonesia Maju dan Sejahtera.

Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional/
Kepala Bappenas

Prof. Dr. Ir. Rachmat Pambudy, M.S.

Menteri Koordinator Bidang
Pemberdayaan Masyarakat

Dr. (HC) Abdul Muhaimin Iskandar, M.Si

Menteri Sosial

Drs. H. Saifullah Yusuf

Menteri Dalam Negeri

Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., PhD

Kepala Badan Pusat Statistik

Amalia Adininggar Widyasanti, ST, M.Si, M.Eng., PhD



*“Untuk pertama kali
dalam **sejarah**, kita
sekarang mempunyai
**Data Tunggal Sosial
dan Ekonomi
Nasional**”*



KOLABORASI PEMANFAATAN DTSEN UNTUK BANSOS

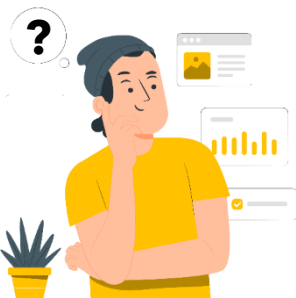


DTSEN dimanfaatkan untuk penyaluran Bansos pada Triwulan 2-2025; setelah sebelumnya penyaluran bansos triwulan 1-2025 merupakan masa transisi.

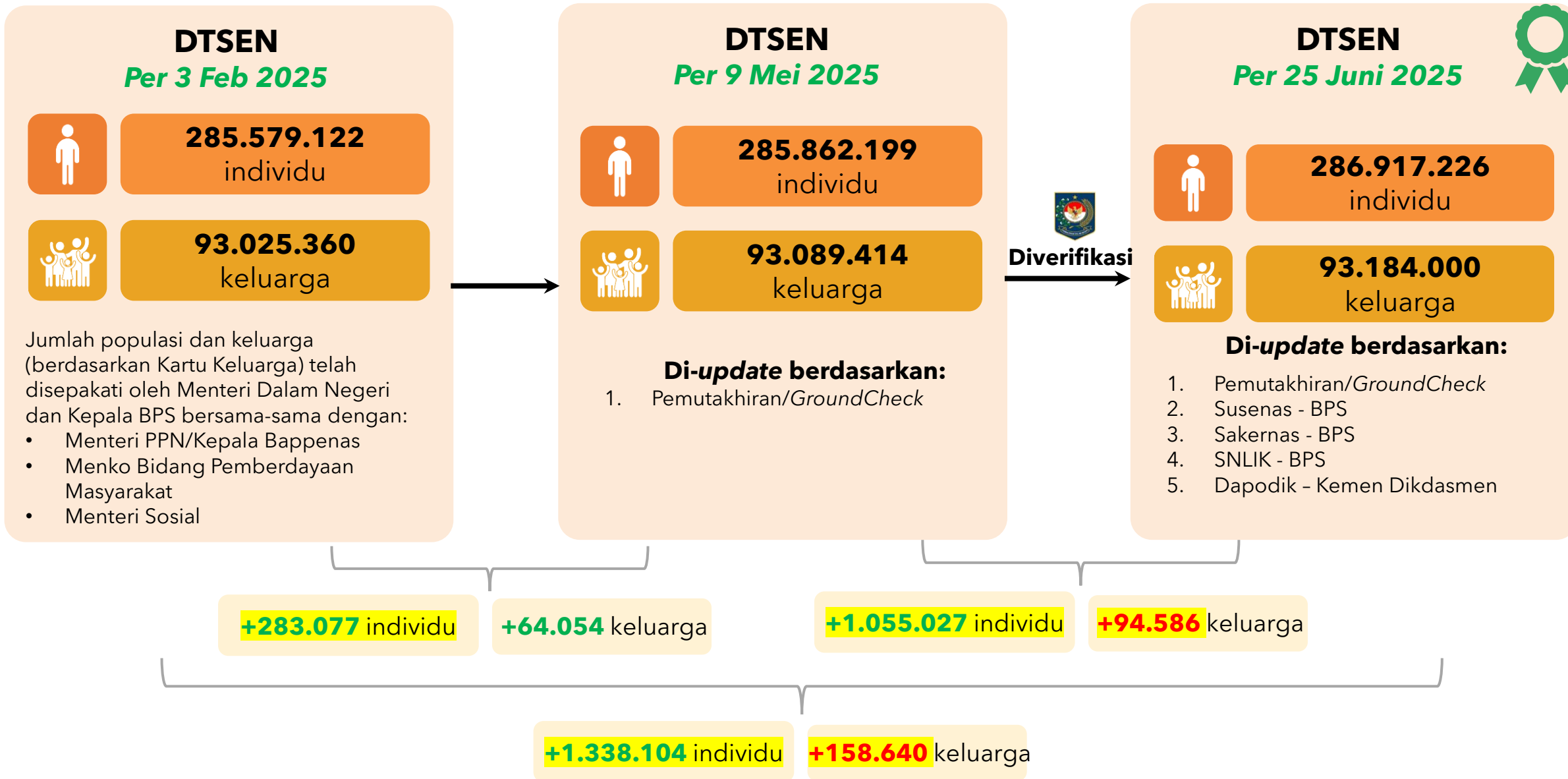


GROUND CHECK OLEH BPS DAN KEMENSOS

- ✓ *Ground check* untuk mengecek *inclusion error* dan *exclusion error* pada penyaluran tahap 1 sehingga dapat menyempurnakan DTSEN untuk penyaluran tahap berikutnya.
- ✓ Hasil *ground check* digunakan BPS untuk memutakhirkan DTSEN.
- ✓ Proses berkelanjutan demi penyempurnaan dan pengelolaan DTSEN jangka panjang.



UPDATE DTSEN DENGAN DATA ADMINISTRASI DAN SURVEI BPS



KOLABORASI PEMANFAATAN DTSEN

dalam Program Perumahan



Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis data untuk menyalurkan program **bantuan perumahan:**

- ✓ Perumahan bagi guru
- ✓ Perumahan bagi tenaga kesehatan
- ✓ Perumahan bagi wartawan
- ✓ Perumahan bagi buruh
- ✓ Perumahan bagi pekerja migran dan keluarganya
- ✓ Perumahan bagi ASN di pusat maupun daerah
- ✓ Perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah lainnya

PERAN BPS DALAM TIM PENYELENGGARAAN SEKOLAH RAKYAT

Tim Pengarah

- Pengarah : Menko Pemas, Menko PMK, Mensesneg, Kepala KSP, Kepala BP Taskin
- Pembina : Mendikdasmen, Mendiktisaintek, Menag, Mendagri, Menkeu, MenPU, MenBUMN, MenATR/BPN, MenPANRB,
- Penanggungjawab : Menteri Sosial Operasional

Tim Pengawas : Seskab, BPKP, Kemnaker, BP2MI, KemenPPPA, Para Gubernur, Bupati dan Walikota

Tim Pelaksana : Wamensos, Sekjen Kemensos, Perwakilan Kementerian Terkait

Tim Ahli : Prof. Dr. Ir. Mohammad Nuh, DEA & Tim Ahli



Sekretariat Bersama Tim Formatur Sekolah Rakyat : Biro Perencanaan Kemensos

Sekolah
Rakyat

BPS masuk dalam Satgas Peserta Didik dengan tugas antara lain: **melakukan pemadanan data calon peserta didik dengan DTSEN dan memberikan informasi peringkat kesejahteraan keluarganya.**

DUKUNGAN BPS UNTUK PROGRAM SEKOLAH RAKYAT



KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jl. Salemba Raya No. 28 Jakarta Pusat 10430 Telp. (021) 3103591 <http://www.kemensos.go.id>

Nomor : 1824/1/DL.03/5/2025 30 Mei 2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 Berkas
Hal : Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Rakyat Tahap I b Tahun Akademik 2025/2026

Yth :
Gubernur/Walikota/Bupati (Daftar Terlampir)
di Tempat

Sesuai dengan Instruksi Presiden RI nomor 8 tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan, Pemerintah melalui Kementerian Sosial RI menyelenggarakan Sekolah Rakyat. Sekolah Rakyat merupakan implementasi langsung dari visi Presiden untuk memutus transmisi kemiskinan melalui pendidikan berkualitas yang inklusif dan berbasis asrama (*boarding school*). Sehubungan dengan hal ini, kami membuka pendaftaran peserta didik baru untuk penyelenggaraan Sekolah Rakyat tahap I b di 37 (tiga puluh tujuh) titik lokasi (terlampir). Adapun tahapan penerimaan peserta didik baru Sekolah Rakyat sebagai berikut:

1. Kementerian Sosial telah menyerahkan data *By Name By Address* yang berasal dari desil 1 (satu) DTSEN kepada daerah melalui Dinas Sosial, SDM PKH dan Lembaga penyelenggara Sekolah Rakyat.
2. Dinas Sosial bersama dengan SDM PKH, BPS, dan penyelenggara Sekolah Rakyat melakukan verifikasi di lapangan untuk kemudian diusulkan melalui *link* pendaftaran Satgas Penerimaan Peserta Didik Sekolah Rakyat (<https://sdmpkh.kemensos.go.id/sr/>). Adapun data di luar desil 1 (satu) DTSEN namun layak untuk diusulkan menjadi calon siswa (*exclusion error*), dapat diusulkan dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu (SKTM), dan atas data tersebut agar berkoordinasi dengan BPS daerah untuk diusulkan dalam DTSEN sesuai dengan kondisi kesejahteraannya.
3. Pemerintah Daerah melalui Dinas Sosial bersama dengan BPS daerah, Dinas Pendidikan dan Lembaga penyelenggara Sekolah Rakyat agar melakukan proses seleksi terhadap data poin 2 (dua) sesuai dengan kebutuhan jumlah rombongan belajar dan jenjang pendidikan yang telah ditentukan beserta cadangan sebanyak 10% dari kebutuhan jumlah peserta didik.
4. Hasil poin 3 (tiga) agar dituangkan dalam Surat Keputusan oleh Kepala Daerah tentang Penetapan Calon Peserta Didik Baru Sekolah Rakyat (format terlampir) dan dapat diserahkan kepada Direktorat Jaminan Sosial sebagai Satgas Rekrutmen Siswa paling lambat tanggal 13 Juni 2025.
5. Dinas Sosial dapat menginformasikan kepada calon peserta didik yang telah ditetapkan bahwa mereka memasuki tahap selanjutnya dalam proses penerimaan

Surat Sekjen Kemensos Nomor : 1824/1/DL.03/5/2025:

Poin 1

Kementerian Sosial telah menyerahkan data *By Name By Address* yang berasal dari desil 1 (satu) DTSEN kepada daerah melalui Dinas Sosial, SDM PKH dan Lembaga penyelenggara Sekolah Rakyat.

Poin 2

Dinas Sosial bersama dengan SDM PKH, BPS, dan penyelenggara Sekolah Rakyat melakukan verifikasi di lapangan untuk kemudian diusulkan melalui link pendaftaran Satgas Penerimaan Peserta Didik Sekolah Rakyat (<https://sdmpkh.kemensos.go.id/sr/>). Adapun data di luar desil 1 (satu) DTSEN namun layak untuk diusulkan menjadi calon siswa (*exclusion error*), dapat diusulkan dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu (SKTM), dan atas data tersebut agar berkoordinasi dengan BPS daerah untuk diusulkan dalam DTSEN sesuai dengan kondisi kesejahteraannya.

Poin 3

Pemerintah Daerah melalui Dinas Sosial bersama dengan BPS daerah, Dinas Pendidikan dan Lembaga penyelenggara Sekolah Rakyat agar melakukan proses seleksi terhadap data poin 2 (dua) sesuai dengan kebutuhan jumlah rombongan belajar dan jenjang pendidikan yang telah ditentukan beserta cadangan sebanyak 10% dari kebutuhan jumlah peserta didik.

PERSENTASE DAN JUMLAH PENDUDUK 7–18 TAHUN MENURUT STATUS SEKOLAH (MARET 2024)



Jumlah Penduduk Usia 7–18 Tahun Menurut Status Sekolah, Maret 2024

Kelompok Umur	Tidak/Belum Pernah Sekolah	Masih Sekolah	Tidak Bersekolah Lagi	Total (2+4)	Total (2+3+4)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7 –12 Tahun	220.006	27.718.054	7.318	227.324	27.945.378
13–15 Tahun	57.903	12.546.445	442.047	499.950	13.046.396
16–18 Tahun	89.027	10.106.720	3.344.128	3.433.154	13.539.874
Total (7–18 Tahun)	366.935	50.371.219	3.793.494	4.160.429	54.531.648

Persentase Penduduk Usia 7–18 Tahun Menurut Status Sekolah, Maret 2024 (persen)

Kelompok Umur	Tidak/Belum Pernah Sekolah	Masih Sekolah	Tidak Bersekolah Lagi	Total (2+4)	Total (2+3+4)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7 –12 Tahun	0,79	99,19	0,03	0,81	100,00
13–15 Tahun	0,44	96,17	3,39	3,83	100,00
16–18 Tahun	0,66	74,64	24,70	25,36	100,00
Total (7–18 Tahun)	0,67	92,37	6,96	7,63	100,00

PEMANFAATAN DTSEN UNTUK PENJARINGAN CALON SISWA SEKOLAH RAKYAT

Anak usia sekolah di desil 1-2 yang tidak bersekolah di Jawa Barat dan Papua

Jawa Barat

NIK	Nama	Nomor Kartu Keluarga	Umur	Jenis Kelamin	Ijazah Tertinggi yang Ditamatkan	Status Bekerja
3674[REDACTED]003	ANDIKA PRAMUDIA	3201[REDACTED]003	12	Laki-laki	-	Tidak Bekerja
3674[REDACTED]002	ALEXIS JULIANO MUSA BALI	3201[REDACTED]006	7	Laki-laki	-	Tidak Bekerja
7502[REDACTED]003	PUTRI LESMANA SARI	3214[REDACTED]004	12	Perempuan	Tidak punya ijazah SD	Tidak Bekerja
5203[REDACTED]003	KEISHA INTAN AZZAHRA	3275[REDACTED]004	8	Perempuan	-	Tidak Bekerja
3674[REDACTED]004	HELENA	3217[REDACTED]013	18	Perempuan	SMP	Tidak Bekerja

Papua

NIK	Nama	Nomor Kartu Keluarga	Umur	Jenis Kelamin	Ijazah Tertinggi yang Ditamatkan	Status Bekerja
9211[REDACTED]001	MAKDALENA IBA	9202[REDACTED]008	10	Perempuan	-	Tidak Bekerja
9211[REDACTED]001	ARIS INDEN	9202[REDACTED]006	15	Laki-laki	-	Bekerja
9212[REDACTED]001	YUSTUS INDOU	9202[REDACTED]002	17	Laki-laki	-	Bekerja
9271[REDACTED]001	ANUGERAH	9271[REDACTED]013	13	Laki-laki	Tidak punya ijazah SD	Tidak Bekerja
9205[REDACTED]001	MESAK OKTOVIANUS METUS MANGGAPROUW	9205[REDACTED]001	14	Laki-laki	Tidak punya ijazah SD	Tidak Bekerja

Sumber: DTSEN

DESIL 1 – CONTOH PROFIL KELUARGA DARI ANAK USIA SEKOLAH

KOTA BANDUNG

Kecamatan SUKAJADI, Kelurahan CIPEDES
JL.SUKAGALIH GG. PAK ELAS V NO. 82



Contoh Desil 1

Nama	:	TIARA [REDACTED]
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Umur	:	15 tahun
Status Partisipasi Sekolah	:	Masih bersekolah
Jenjang pendidikan tertinggi	:	SMP
Pekerjaan kepala keluarga	:	Pekerja bebas non pertanian pada sektor lapangan usaha konstruksi
Kepemilikan Rumah	:	Kontrak/sewa
Jenis Lantai Terluas	:	Keramik
Jenis Atap Terluas	:	Genteng
Jenis Dinding Terluas	:	Tembok
Air Minum dan Bahan Bakar Utama	:	Air isi ulang dan Gas elpiji 3kg
Kepemilikan Aset	:	Smartphone

DESIL 2 – CONTOH PROFIL KELUARGA DARI ANAK USIA SEKOLAH

KOTA BANDUNG

Kecamatan BOJONGLOA KIDUL, Kelurahan CIBADUYUT
JL. MA EJA



Contoh Desil 2

Nama	:	WULAN [REDACTED]
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Umur	:	13
Status Partisipasi Sekolah	:	Masih bersekolah
Jenjang pendidikan tertinggi	:	SMP
Pekerjaan kepala keluarga	:	Buruh/karyawan pada sektor lapangan usaha aktivitas jasa lainnya

Kepemilikan Rumah	:	Kontrak/sewa
Jenis Lantai Terluas	:	Keramik
Jenis Atap Terluas	:	Genteng
Jenis Dinding Terluas	:	Tembok
Air Minum dan Bahan Bakar Utama	:	Leding dan Gas elpiji 3kg
Kepemilikan Aset	:	Sepeda motor, Sepeda, dan Smartphone

TERIMA KASIH

SENSUS EKONOMI 2026 MILIK INDONESIA!

“Mari Kawal Bersama, Langkah Besar Wujudkan
Kemandirian Perekonomian Bangsa Untuk
Indonesia yang Lebih Sejahtera”

#MencatatEkonomiIndonesia

